

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA PERIODE 2008-2013

Ary Anjani Denis¹
anjanidenis@yahoo.com

Mesak Iek²
imesaki@yahoo.com

Robert M. WST. Marbun³
robert@ieuncen.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pendapatan Provinsi Papua dan kinerja belanja Provinsi Papua tahun 2008 – 2013. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data runtun waktu selama enam tahun yaitu tahun 2008 – 2013. Objek yang diteliti adalah hasil laporan realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua serta realisasi belanja Provinsi Papua selama enam tahun. Metode analisis data yang digunakan adalah efektivitas pendapatan dan daya serap belanja.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara deskriptif Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dilihat dari Efektivitas Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2008-2013, secara umum dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi Pendapatan yang diperoleh Provinsi Papua sebesar 100,66%. Sedangkan Kinerja Keuangan Belanja Daerah Provinsi Papua dilihat dari Daya serap Belanja, realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua mampu melakukan daya serap dalam penggunaan anggarannya. Sehingga dalam hal ini daya serap belanja Provinsi Papua dapat dikatakan cukup baik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Pendapatan merupakan gambaran mengenai hasil pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam strategi *planning* suatu organisasi. Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi

¹ Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling dominan. (Chitra Ananda, 2013 :5).

Kinerja belanja merupakan pengeluaran keuangan negara yang diperlukan kajian prioritas yang didasarkan pada Rencana Strategis, hal ini berarti berlandaskan pada pencapaian yang akan dicapai. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran. (Mahmudi, 2010 :156).

Efektifitas pendapatan Provinsi Papua selalu tinggi melebihi target, hal ini dikarenakan pihak Dinas Pendapatan Daerah memperhitungkan target yang akan dicapai karena apabila tidak mencapai target maka akan mempengaruhi kinerja Dispenda. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi pendapatan yang belum diolah oleh Dinas Pendapatan Daerah, karena tidak adanya Peta Potensi bagi pemerintah untuk mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada pada tiap-tiap daerah untuk diatur pengelolaannya.

Untuk mengukur kinerja keuangan dari sisi belanja dapat dilihat dari besarnya penyerapan anggaran belanja (Daya Serap). Realisasi belanja harus sesuai dengan anggaran belanja yang sudah direncanakan dalam APBD. Apabila realisasi belanja melebihi anggaran maka akan menyebabkan defisit, sehingga pemerintah harus menggunakan belanja dengan lebih efisien. Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang serta penjelasan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah : (1) bagaimana kinerja Pendapatan Provinsi Papua selama periode 2008 – 2013, (2) bagaimana kinerja Belanja Provinsi Papua selama periode 2008 – 2013.

Adapun tujuannya secara umum adalah untuk : (1) mengetahui Kinerja Pendapatan Provinsi Papua periode 2008 – 2013, (2) mengetahui Kinerja Belanja Provinsi Papua periode 2008 – 2013.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Studi

Secara garis besarnya pendekatan yang digunakan dalam studi ini terdiri atas dua bagian yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu : (a) menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore), (b) menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Dalam penggunaan pendekatan ini, hasil penelitian merupakan deskripsi interpretasi yang mana peneliti berusaha menjelaskan dan mendiskripsikan setiap obyek yang ditelitinya bersifat tentative dalam konteks waktu dan situasi tertentu. Kebenaran hasil penelitian lebih banyak didukung melalui kepercayaan berdasarkan konfirmasi dengan pihak-pihak yang diteliti. Pendekatan ini sering disebut juga dengan pendekatan kualitatif.

Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena yang obyektif dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel-sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Adapun hasil dari penelitian merupakan generalisasi dan prediksi berdasarkan hasil-hasil pengukuran yang kebenaran hasil penelitiannya didukung oleh validitas cara/alat yang digunakan.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam studi ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data atau sekumpulan data yang diperoleh, diliput dan dikumpulkan dari berbagai laporan yang telah dipublikasikan oleh beberapa institusi yang relevan. Data sekunder yang akan diliput antara lain: (a) APBD Provinsi Papua berupa data target & realisasi APBD tahun 2008-2013. Data ini diperoleh dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Provinsi Papua. Adapun teknik utama pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini antara lain dokumentasi dan studi kepustakaan.

Analisa Data

Untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana ditetapkan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data antara lain; Rasio Efektivitas Pendapatan dan Rasio Penyerapan Anggaran.

Rasio Efektivitas Pendapatan

Efektivitas pendapatan digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Melalui data APBD berdasarkan target dan realisasi, dapat dilakukan analisis dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2010:143)

Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90% – 99%
- Kurang Efektif : 75% - 89%
- Tidak efektif : <75%

Rasio Penyerapan Anggaran

Rasio penyerapan anggaran digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menggunakan anggarannya sesuai dengan yang ditetapkan. Daya serap belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Daya Serap Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2010:143)

Secara umum, nilai penyerapan anggaran dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Sangat Baik : 96% – 100%
- Baik : 91% – 95%
- Cukup Baik : 86% – 90%
- Kurang Baik : 81% – 85%
- Tidak Baik : <80%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2008-2013

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling dominan. (Chitra Ananda; 2013.5). Untuk melihat hal tersebut apakah kinerja pendapatan telah berjalan dengan baik dan efektif, dapat diukur menggunakan Rasio Efektivitas pendapatan dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Berikut di bawah ini merupakan tabel hasil dari perhitungan Rasio efektivitas pendapatan:

Tabel 1.
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan

Tahun	APBD		Rasio Efektivitas Pendapatan
	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
2008	5.770.524.722.000,00	5.757.078.135.237,00	99,76%
2009	6.063.064.092.000,00	6.012.822.338.440,00	99,17%
2010	5.499.012.679.000,00	5.661.736.548.920,14	102,95%
2011	6.239.786.688.550,00	6.227.545.144.533,73	99,80%
2012	7.386.153.782.850,00	7.462.044.973.525,00	101,02%
2013	8.298.239.247.000,00	8.397.158.332.245,00	101,19%
Total	39.256.781.211.400,00	39.518.385.472.900,90	100,66%

Sumber : Data Diolah (2015)

Berdasarkan tabel di atas rasio efektivitas pendapatan tahun 2008 menunjukkan angka 99,76% berarti pada tahun ini pendapatan dikatakan Cukup efektif. Kemudian tahun 2009 menunjukkan angka 99,17% dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pendapatan dikatakan cukup efektif pula. Sedangkan pada tahun 2010 efektifitas pendapatan menunjukkan angka 102,95% yang berarti pendapatan pada tahun tersebut sangat efektif. Namun pada tahun 2011 efektivitas pendapatan menurun menjadi 99,80% sehingga hal ini hanya dapat dikatakan cukup efektif. Pada tahun 2012 dan 2013 pendapatan daerah menjadi sangat efektif dengan menunjukkan angka presentase lebih dari 100% yakni sebesar 101,02% dan 101,19%.

Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran seperti hal di atas, namun perlu juga meninjau lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling dominan sehingga Kinerja Pendapatan pada tiap-tiap tahunnya dapat dikategorikan dalam kriteria Cukup efektif dan Sangat efektif sehingga efektivitas pendapatan

daerah tahun anggaran 2008 – 2013 memperoleh rata-rata sebesar 100,66%. Berikut ini merupakan Tabel yang akan menunjukkan komponen apa yang paling dominan dalam pendapatan agar lebih mendukung kriteria tersebut:

Tabel 2.
Realisasi Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2008 – 2013

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PENDAPATAN	5.757.078.135.237,00	6.012.822.338.440,00	5.661.736.548.920,14	6.227.545.144.533,73	7.462.044.973.525,00	8.397.158.332.245,00
PAD	357.741.754.696,00	369.727.113.037,00	380.025.633.524,14	363.100.749.953,73	623.162.647.355,00	633.726.316.291,00
Pendapatan Pajak Daerah	259.185.991.678,00	242.788.565.711,00	252.434.826.256,00	275.091.605.790,00	401.691.993.696,00	453.677.291.141,00
Pendapatan Retribusi Daerah	19.710.392.088,00	20.576.682.593,00	21.171.950.088,00	18.889.330.977,00	15.773.346.925,00	24.524.171.734,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26.418.177.843,00	28.926.619.817,00	30.340.833.072,00	19.887.905.137,00	22.598.925.557,00	25.792.803.380,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	52.427.193.087,00	77.435.244.916,00	76.078.024.108,14	49.231.908.049,73	183.098.381.177,00	129.732.050.036,00
PENDAPATAN TRANSFER	5.357.136.380.541,00	5.643.095.225.403,00	5.257.399.077.896,00	5.850.944.394.580,00	6.523.280.816.170,00	7.438.399.305.954,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.766.993.483.541,00	1.563.054.900.403,00	1.762.534.289.896,00	1.893.484.847.030,00	2.118.450.110.170,00	2.511.020.685.954,00
Dana Bagi Hasil Pajak	198.461.591.855,00	203.582.806.979,00	252.799.169.554,00	269.335.254.508,00	311.768.070.269,00	308.441.262.944,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	201.897.066.686,00	219.971.329.424,00	286.182.154.342,00	275.748.034.522,00	130.708.425.901,00	179.414.333.010,00
Dana Alokasi Umum	1.002.431.825.000,00	1.058.227.764.000,00	1.148.497.966.000,00	1.276.285.908.000,00	1.569.782.444.000,00	1.889.267.850.000,00
Dana Alokasi Khusus	364.203.000.000,00	81.273.000.000,00	75.055.000.000,00	72.115.650.000,00	106.191.170.000,00	133.897.240.000,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	3.590.142.897.000,00	4.080.040.325.000,00	3.494.864.788.000,00	3.957.459.547.550,00	4.404.830.706.000,00	4.927.378.620.000,00
Dana Otonomi Khusus	3.590.142.897.000,00	4.079.797.400.000,00	3.494.864.788.000,00	3.957.459.547.550,00	4.404.830.706.000,00	4.927.378.620.000,00
Dana Penyesuaian	0,00	242.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	42.200.000.000,00	0,00	24.311.837.500,00	13.500.000.000,00	315.601.510.000,00	325.032.710.000,00
Pendapatan Hibah	7.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	34.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	24.311.837.500,00	13.500.000.000,00	315.601.510.000,00	325.032.710.000,00

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2015

Seperti yang ditampilkan pada tabel di atas terdapat tiga komponen utama yang mendukung peningkatan Pendapatan Provinsi Papua, ketiga komponen tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dari ketiga komponen penting tersebut masing-masing memiliki item-item yang sangat dominan terhadap Pendapatan, karena dari item-item tersebut kita dapat mengetahui apakah selama tahun 2008 – 2013 anggaran telah terlaksana secara efektif dan komponen apa yang paling berpengaruh pada masing-masing tahun tersebut sehingga Rasio Efektivitas Pendapatan Provinsi Papua dikatakan Sangat efektif, Efektif dan Cukup efektif.

Komposisi realisasi pendapatan tahun 2008 didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 357.741.754.696,00 meskipun angka tersebut terbilang besar namun nilai tersebut belum mampu menutupi kekurangan dari total pendapatan dalam tahun 2008, karena masih terdapat komponen lain yang memiliki nilai lebih seperti Pendapatan Transfer sebesar Rp 5.357.136.380.541,00 dimana nilai tersebut didukung oleh item seperti Transfer pemerintah pusat-lainnya dan Dana otsus dengan nilai yang sama. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah daerah belum mampu membiayai daerahnya sendiri atau penerimaan pendapatan asli daerah yang masih kecil sehingga pemerintah daerah masih perlu menggali lagi sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Transfer yang mampu mendukung total pendapatan tahun 2008 sehingga pada tahun ini dapat dikatakan Cukup efektif dengan rasio efektivitas sebesar 99,76%.

Komposisi realisasi pendapatan tahun 2009 didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 369.727.113.037,00 angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2008, namun masih belum mampu menutupi kekurangan dari total pendapatan daerah tahun 2009 karena masih didominasi oleh komponen lain yang memiliki nilai lebih besar dari Pendapatan asli daerah seperti Pendapatan transfer, dimana nilai tersebut didukung oleh item seperti Transfer pemerintah lainnya. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah masih tergantung pada Dana transfer dari pusat dikarenakan masih minimalnya Pendapatan asli daerah. Hal ini menggambarkan bahwa porsi bantuan dari pusat masih mendominasi pendapatan daerah. Fenomena ini perlu dikaji karena berdasarkan data yang ada potensi ekonomi yang dimiliki daerah untuk mengembangkan Pendapatan asli daerah masih cukup besar, namun potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tidak semua komponen dalam Pendapatan mampu mendukung pendapatan pada tahun 2009, sehingga hanya dapat dikategorikan Cukup efektif dengan rasio efektivitas sebesar 99,17%.

Pada tahun 2010 rasio efektivitas mencapai 102,95% yang berarti Sangat efektif dikarenakan pada tahun tersebut tingkat Pendapatan asli daerah naik senilai Rp 380.025.633.524,14. Nilai tersebut cukup mampu menutupi kekurangan dari total pendapatan tahun 2010, sehingga dana transfer yang diberikan pemerintah pusat mengalami penurunan, meskipun nilai transfer pemerintah pusat masih mendominasi

total pendapatan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dimana hal ini didukung oleh tingginya total pendapatan dari sektor pajak daerah, retribusi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun sebelumnya.

Komposisi realisasi pendapatan tahun 2011 sebesar Rp. 6.227.545.144.533,73 yang seharusnya didominasi oleh Pendapatan asli daerah namun angka tersebut belum mampu menutupi total pendapatan daerah, karena masih terdapat komponen lain seperti pendapatan transfer sebesar Rp 5.850.944.394.580,00. Angka tersebut mengalami peningkatan dari 3 tahun sebelumnya sehingga dapat menutupi kekurangan dari total pendapatan tahun 2011, dimana nilai tersebut didukung oleh tingginya item transfer pemerintah pusat-lainnya dan dana otonomi khusus. Hal ini di sebabkan karena pemerintah daerah belum mampu mendanai kebutuhannya sendiri, sehingga pemerintah pusat membantu dengan memberikan bantuan dana dalam mendukung pertumbuhan maupun untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dengan begitu pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dan juga memenuhi kebutuhan fiskal daerah sesuai dengan apa yang di harapkan oleh daerah. Sehingga rasio efektivitas pendapatannya dikatakan cukup efektif.

Pada tahun 2012 komposisi realisasi pendapatan sebesar Rp 7.462.044.973,525,00 yang didominasi oleh Pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, namun dengan meningkatnya PAD hal tersebut belum dapat menutupi total dari pendapatan daerah dikarenakan masih tingginya komponen Pendapatan transfer yang juga mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga hal inilah yang menyebabkan rasio efektivitas pendapatan dikatakan Sangat efektif.

Tahun 2013 realisasi pendapatan sebesar Rp 8.397.158.332.245,00 nilai tersebut didominasi oleh Pendapatan asli daerah yang sebesar Rp 6.33.726.316.291,00, namun hal tersebut belum mampu menutupi kekurangan dari total pendapatan dikarenakan pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp 7.438.399.305.954,00 yang didukung oleh tingginya transfer pemerintah pusat-lainnya dan dana otonomi khusus. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan pusat ke daerah bisa merupakan dana pembangunan proyek khusus, misalnya pembangunan infrastruktur jalan dan juga alokasi dana yang diberikan pusat ke daerah dan daerah diberikan kewenangan/keleluasaan untuk menggunakan dana tersebut. Dengan meningkatnya PAD dan Pendapatan transfer maka rasio efektivitas pada tahun ini meningkat sebesar 101,19% yang berarti Sangat efektif.

Analisis Kinerja Belanja Provinsi Papua Tahun 2008-2013

Penyerapan anggaran digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan anggarannya, dimana berdasarkan hal tersebut akan dilihat apakah anggaran yang digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBD. Di bawah ini tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2008 – 2013:

Tabel 3.
Belanja Daerah Tahun 2008

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA	6.220.608.845.907,00	5.750.667.126.461,00	92,44%
BELANJA OPERASI	4.528.528.347.023,00	3.987.214.780.269,00	88,04%
Belanja Pegawai	769.500.402.932,00	596.452.389.281,00	77,51%
Belanja Barang	0,00	0,00	0,00%
Belanja Hibah	5.645.000.000,00	5.630.000.000,00	99,73%
Belanja Bantuan Sosial	596.404.601.096,00	534.314.519.702,00	89,58%
Belanja Bantuan Keuangan	2.608.209.657.892,00	2.537.008.414.225,00	97,27%
BELANJA MODAL	2.233.394.065.638	1.049.192.740.138,00	46,97%
Belanja Tanah	682.352.146.311,00	15.562.338.513,00	2,28%
Belanja Peralatan dan Mesin	775.226.180.053,00	198.002.457.736,00	25,54%
Belanja Bangunan dan Gedung	775.226.180.053,00	237.007.648.297,00	30,57%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	775.226.180.053,00	538.642.980.007,00	69,48%
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%
BELANJA TAK TERDUGA	267.455.569.270,00	82.818.210.300,00	30,96%
Belanja Tak Terduga	267.455.569.270,00	82.818.210.300,00	30,96%
TRANSFER	90.127.829.000,00	59.977.315.585,00	66,54%
Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa	90.127.829.000,00	59.977.315.585,00	66,54%
Bagi Hasil Pajak	90.127.829.000,00	59.977.315.585,00	66,54%

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan tabel perhitungan di atas untuk tahun 2008 menunjukkan angka 92,44% yang berarti pada tahun ini daya serap belanjanya dikatakan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam realisasi belanja pemerintah provinsi papua tidak melakukan pemborosan dalam penyerapan anggaran belanjanya. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah melakukan setiap kegiatan yang berhubungan dengan sumber dana realisasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah.

Tabel 4.
Belanja Daerah Tahun 2009

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA	6.383.782.092.000,00	5.294.198.937.980,00	82,93%
BELANJA OPERASI	4.616.256.240.940,00	3.942.202.805.669,00	85,40%
Belanja Pegawai	892.987.919.465,00	826.156.299.567,00	92,52%
Belanja Barang	1.059.507.874.475,00	891.988.194.602,00	84,19%
Belanja Hibah	7.707.000.000,00	442.780.000,00	5,75%
Belanja Bantuan Sosial	546.021.633.000,00	500.127.970.500,00	91,59%
Belanja Bantuan Keuangan	2.110.031.814.000,00	1.723.487.561.000,00	81,68%
BELANJA MODAL	1.613.766.558.079,00	1.199.489.101.030,00	74,33%
Belanja Tanah	68.957.350.000,00	7.354.953.000,00	10,67%
Belanja Peralatan dan Mesin	290.866.165.654,00	189.080.656.700,00	65,01%
Belanja Bangunan dan Gedung	279.619.721.700,00	266.196.166.377,00	95,20%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	833.515.693.475,00	636.345.986.323,00	76,34%
Belanja Aset Tetap Lainnya	140.807.627.250,00	100.511.338.630,00	71,38%
BELANJA TAK TERDUGA	49.415.946.981,00	48.187.817.418,00	97,51%
Belanja Tak Terduga	49.415.946.981,00	48.187.817.418,00	97,51%
TRANSFER	104.343.346.000,00	104.319.213.863,00	99,98%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	104.343.346.000,00	104.319.213.863,00	99,98%
Bagi Hasil Pajak	104.343.346.000,00	104.319.213.863,00	99,98%

Sumber: Data diolah (2015)

Untuk tahun 2009, penyerapan belanja menunjukkan angka 82,93%. Sehingga tahun 2009 dapat dikatakan memiliki daya serap belanja yang kurang baik, sehingga pemerintah perlu melakukan analisis standar belanja (ASB) sebagai dasar penentuan besarnya alokasi dana untuk setiap pengeluaran pemerintah daerah.

Tabel 5.
Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2010

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA	6.449.763.594.000,00	5.650.474.891.742,14	87,60%
BELANJA OPERASI	4.682.059.062.280,00	4.130.885.061.529,14	88,23%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO PENYERAPAN ANGGARAN
Belanja Pegawai	897.806.806.363,00	777.065.779.301,00	86,55%
Belanja Barang	1.421.517.880.625,00	1.260.514.916.732,14	88,67%
Belanja Hibah	93.233.500.000,00	61.440.129.856,00	65,90%
Belanja Bantuan Sosial	496.710.497.292,00	391.137.476.640,00	78,75%
Belanja Bantuan Keuangan	1.772.790.378.000,00	1.640.726.759.000,00	92,55%
BELANJA MODAL	1.624.457.673.058,00	1.404.550.459.868,00	86,465
Belanja Tanah	18.848.000.000,00	11.010.089.000,00	58,42%
Belanja Peralatan dan Mesin	269.456.986.330,00	187.558.882.800,00	69,61%
Belanja Bangunan dan Gedung	283.746.683.042,00	261.532.240.878,00	92,17%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	938.674.780.986,00	851.726.147.790,00	90,74%
Belanja Aset Tetap Lainnya	113.731.222.700,00	92.723.099.400,00	81,53%
BELANJA TAK TERDUGA	33.918.088.317,00	5.710.600.000,00	16,84%
Belanja Tak Terduga	33.918.088.317,00	5.710.600.000,00	16,84%
TRANSFER	109.328.770.345,00	109.328.770.345,00	100,00%
Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa	109.328.770.345,00	109.328.770.345,00	100,00%
Bagi Hasil Pajak	109.328.770.345,00	109.328.770.345,00	100,00%

Sumber: Data diolah (2015)

Tahun 2010 penyerapan belanja dapat dikatakan cukup baik dengan menunjukkan angka 87,60%. Sehingga pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan aloksi biaya anggaran yang lebih rendah dari yang ditetapkan, sehingga sasaran dan pelayanan yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran.

Tabel 6.
Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2011

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA	7.008.690.497.550,00	6.290.375.712.882,75	89.75%
BELANJA OPERASI	5.315.613.931.636,00	4.762.070.057.903,75	89,59%
Belanja Pegawai	929.597.579.740,00	866.786.394.314,00	93,24%
Belanja Barang	1.492.182.780.896,00	1.351.970.752.489,75	90,60%
Belanja Hibah	359.594.355.000,00	133.847.556.000,00	37,22%
Belanja Bantuan Sosial	347.926.947.000,00	283.208.629.100,00	81,40%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO PENYERAPAN ANGGARAN
Belanja Bantuan Keuangan	2.186.312.269.000,00	2.126.256.726.000,00	97,25%
BELANJA MODAL	1.567.314.748.064,00	1.421.658.223.557,00	90,71%
Belanja Tanah	32.438.430.000,00	19.551.612.500,00	60,27%
Belanja Peralatan dan Mesin	251.685.311.675,00	244.432.223.134,00	97,12%
Belanja Bangunan dan Gedung	370.494.359.550,00	326.245.046.100,00	88,06%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	854.113.019.339,00	797.825.286.403,00	93,41%
Belanja Aset Tetap Lainnya	58.583.627.500,00	33.604.055.420,00	57,36%
BELANJA TAK TERDUGA	21.098.817.850,00	2.978.368.924,00	14,12%
Belanja Tak Terduga	21.098.817.850,00	2.978.368.924,00	14,12%
TRANSFER	104.663.000.000,00	103.669.062.498,00	99,05%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	104.663.000.000,00	103.669.062.498,00	99,05%
Bagi Hasil Pajak	104.663.000.000,00	103.669.062.498,00	99,05%

Sumber: Data diolah (2015)

Pada tahun 2011 daya serap belanjanya menunjukkan angka sebesar 89,75%, sehingga dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran sehingga menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar menerminkan kepentingan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Sehingga nantinya akan memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 7.
Belanja Daerah Tahun 2012

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA	7.946.045.794.850,00	7.239.667.120.200,00	91,11%
BELANJA OPERASI	6.334.673.338.828,00	5.816.088.037.742,00	91,81%
Belanja Pegawai	904.087.678.096,00	806.432.183.247,00	89,20%
Belanja Barang	1.673.026.790.458,00	1.540.796.547.967,00	92,10%
Belanja Hibah	860.496.394.274,00	693.635.742.128,00	80,61%
Belanja Bantuan Sosial	220.531.522.000,00	110.610.955.800,00	50,16%
Belanja Bantuan Keuangan	2.676.530.954.000,00	2.664.612.608.600,00	99,55%
BELANJA MODAL	1.456.845.870.942,00	1.309.177.867.378,00	89,86%
Belanja Tanah	19.091.000.000,00	18.300.000.000,00	95,86%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO PENYERAPAN ANGGARAN
Belanja Peralatan dan Mesin	187.077.550.404,00	164.534.880.570,00	87,95%
Belanja Bangunan dan Gedung	528.489.929.800,00	466.058.024.300,00	88,19%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	687.372.177.538,00	627.801.352.836,00	91,33%
Belanja Aset Tetap Lainnya	34.815.213.200,00	32.483.609.672,00	93,30%
BELANJA TAK TERDUGA	40.125.370.000,00	0,00	0,00%
Belanja Tak Terduga	40.125.370.000,00	0,00	0,00%
TRANSFER	114.401.215.080,00	114.401.215.080,00	100,00%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	114.401.215.080,00	114.401.215.080,00	100,00%
Bagi Hasil Pajak	114.401.215.080,00	114.401.215.080,00	100,00%

Sumber: Data diolah (2015)

Tahun 2012 daya serap belanja menunjukkan angka 91,11%, sehingga dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 8.
Belanja Daerah Tahun 2013

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA	8.941.437.247.000,00	8.171.352.348.477,00	91,38%
BELANJA OPERASI	7.152.718.347.000,00	6.705.250.059.389,00	93,74%
Belanja Pegawai	928.838.763.000,00	833.439.639.685,00	89,73%
Belanja Barang	1.898.047.082.000,00	1.694.118.393.186,00	89,26%
Belanja Hibah	685.960.406.000,00	651.084.026.068,00	94,92%
Belanja Bantuan Sosial	274.645.567.000,00	178.167.169.800,00	64,87%
Belanja Bantuan Keuangan	3.365.226.529.000,00	3.348.440.830.650,00	99,50%
BELANJA MODAL	1.525.556.706.000,00	1.220.744.851.353,00	80,02%
Belanja Tanah	45.547.679.000,00	28.541.350.000,00	62,66%
Belanja Peralatan dan Mesin	236.183.322.600,00	184.842.082.253,00	78,26%
Belanja Bangunan dan Gedung	354.975.023.900,00	259.193.175.450,00	73,02%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	847.665.019.500,00	718.444.194.015,00	84,76%
Belanja Aset Tetap Lainnya	41.185.661.000,00	29.724.049.635,00	72,17%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA TAK TERDUGA	30.000.000.000,00	12.556.773.000,00	41,86%
Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00	12.556.773.000,00	41,86%
TRANSFER	233.162.194.000,00	232.800.664.735,00	99,84%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	233.162.194.000,00	232.800.664.735,00	99,84%
Bagi Hasil Pajak	232.249.536.000,00	232.244.314.735,00	100,00%
Bagi Hasil Retribusi	912.658.000,00	556.350.000,00	60,96%

Sumber: Data diolah (2015)

Sedangkan untuk tahun 2013 menunjukkan angka 91,38% dimana angka tersebut dikatakan baik. Hal ini dikarenakan penggunaan daya serap belanja telah efektif sehingga dapat menjamin kesesuaian antara kegiatan serta anggaran dan terlaksananya daya serap belanja yang baik.

Berikut di bawah ini merupakan tabel dari total keseluruhan belanja dari tahun 2008-2013, untuk melihat daya serap belanja dari tahun ke tahun:

Tabel 9.
Daya Serap Belanja Provinsi Papua Tahun 2008-2013

Tahun	APBD		Daya Serap Belanja
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	
2008	6.220.608.845.907,00	5.750.667.126.461,00	92.44%
2009	6.383.782.092.000,00	5.294.198.937.980,00	82.93%
2010	6.449.763.594.000,00	5.650.474.891.742,14	87.60%
2011	7.008.690.497.550,00	6.290.375.712.882,75	89.75%
2012	7.946.045.794.850,00	7.239.667.120.200,00	91.11%
2013	8.941.437.247.000,00	8.171.352.348.477,00	91.38%
Total	42.950.328.071.307,00	38.396.736.137.742,90	89.38%

Sumber : Data Diolah (2015)

Berdasarkan tabel perhitungan di atas dilihat bahwa realisasi anggaran belanja pemerintah Provinsi Papua tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat pemborosan dalam penganggaran belanja untuk enam tahun tersebut. Uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Provinsi Papua dapat dikatakan cukup baik dengan ditunjukkan oleh rasio daya serap belanja yang sebesar 89,38%.

Berdasarkan keseluruhan data di atas total realisasi belanja tiap tahunnya lebih didominasi oleh belanja operasi dari tahun 2008-2013. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat guna memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga ditunjukkan oleh belanja operasi yang lebih cenderung meningkat dari tahun 2008-2013.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dilihat dari Efektivitas Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2008 – 2013, secara umum dikatakan Sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi Pendapatan yang diperoleh Provinsi Papua sebesar 100,66%.
2. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Provinsi Papua dilihat dari Daya serap Belanja, realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua mampu melakukan daya serap dalam penggunaan anggarannya. Sehingga dalam hal ini daya serap Provinsi Papua dapat dikatakan cukup baik.
3. Total realisasi belanja tiap tahunnya lebih didominasi oleh belanja operasional dari tahun 2008-2013. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat guna memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh belanja operasional yang lebih cenderung meningkat dari tahun 2008-2013.

Saran

1. Pemerintah daerah perlu menentukan potensi-potensi sumber daya yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan Provinsi Papua. Selama ini banyak potensi yang sebenarnya bisa diolah namun belum mendapat perhatian dari Dinas Pendapatan Provinsi Papua sehingga perlu dibuat peta potensi yang mencakup semua sumber daya yang akan diolah atau dipungut.
2. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2008-2013. Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda. Chitra, 2013, *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Tahun Aggaran 2009-2011* (Skripsi).
- Azhar, M. K. S. ,2010, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah* (Jurnal).

- Dwirandra, A.A.N.B.,2006, *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002-2006*. Universitas Udayana Bali (Jurnal).
- Frediyanto. Yanuar.,2010, *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah* (Skripsi).
- Gideon, T.B.S.P.H., 2007, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Satya Wacana. Salatiga.
- Kaho. Josef Riwu,1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kadarwati. Ningdyah Sari,2007, *Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 Tentang *Kriteria tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja*.
- Mahmudi,2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Ohei. F. I. ,2003, *Analisis Keuangan Daerah Provinsi Papua Dengan Berlakunya Otonomi Khusus (UU No. 21/2001)*. Universitas Diponegoro. Semarang (Tesis).
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah*.
- Savitry Ermitha,2013, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 Di Kota Makassar* (Skripsi).
- Tripatria,2011, *Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Berdasarkan Kinerja Keuangan pada Era Otonomi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang*. Universitas Negeri Malang. Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 18 Tahun 1945 tentang *Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wulandari, Anita, 2001, *Kemampuan Keuangan Daerah*. Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November. (Online) (<http://www.scribd.com/doc/101754251/JAUJ-Vol-09-No-2-Desember-2011> diakses tanggal 27 Maret 2015).
- Yuliati, 2001, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPYKPN.